

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan politik kontemporer menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat mengekspresikan pandangan dan sikap terhadap berbagai isu sosial maupun politik. Bentuk perlawanan tidak lagi hanya dilakukan melalui demonstrasi atau pernyataan sikap secara langsung, melainkan juga melalui penggunaan simbol-simbol dari budaya populer sebagai sarana penyampaian pesan (Aqil & Atmojo, 2025). Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan media digital yang membuat budaya populer semakin mudah diakses dan dibagikan oleh masyarakat (Basri, 2025). Data Reportal (2025) mencatat bahwa pada Juli 2025 terdapat 5,56 miliar pengguna internet di dunia atau setara dengan 68,7% dari populasi global, dan 5,41 miliar pengguna media sosial atau setara dengan 65,7% populasi global. Tingginya akses terhadap internet dan media sosial membuat konten budaya populer menyebar sangat cepat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kedekatan masyarakat dengan berbagai karakter, simbol, dan cerita fiksi yang hadir melalui film, komik, musik hingga serial animasi membuat simbol-simbol budaya populer menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyuarakan perlawanan sekaligus menyampaikan pesan politik secara kreatif. Visual yang sederhana, mudah dikenali dan sudah melekat secara emosional pada masyarakat membuat makna yang melekat pada simbol-simbol tersebut mampu menyampaikan kritik sosial dan cepat dipahami oleh berbagai kelompok (Fathiya,

2025). Selain itu, pesan-pesan kritis dapat disampaikan tanpa menciptakan ketegangan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa karya fiksi tidak lagi hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana untuk menegaskan identitas dan menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan (Kirchberger, 2025).

Penggunaan simbol populer sebagai bentuk perlawanan bukan hanya menjadi strategi kreatif, tetapi juga respon terhadap situasi politik yang membatasi kebebasan berekspresi. Pengamat budaya populer, Hikmat Darmawan menjelaskan bahwa praktik peminjaman memungkinkan simbol mudah diolah ulang untuk membentuk makna baru yang relevan dengan isu yang diperjuangkan. Kemampuan ini membuat pesan perlawanan dapat menjangkau audiens luas, terutama karena simbol yang sudah akrab di ruang publik lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat (BBC News Indonesia, 2025b). Kondisi tersebut menciptakan ambang partisipasi yang rendah, dimana siapapun dapat mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan tanpa perlu memahami konteks politik secara mendalam. Karakteristik ini memberikan ruang bagi individu maupun kelompok, terutama di negara-negara dengan kontrol ketat terhadap kebebasan berbicara untuk menyampaikan kritik secara halus tanpa memicu sensor ataupun ancaman langsung dari rezim yang berkuasa (Kirchberger, 2025).

Dalam kajian Hubungan Internasional, budaya populer dapat dipahami sebagai salah satu ruang berlangsungnya politik dunia, bukan sekadar produk hiburan. Budaya populer membuka perhatian terhadap praktik politik yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui visualitas, emosi, identitas, dan pengalaman masyarakat. Melalui perspektif ini, simbol-simbol yang berasal dari

anime, film, komik, musik, maupun media digital dapat dianalisis sebagai bagian dari proses sosial-politik karena mampu membentuk cara masyarakat memahami dunia, mengekspresikan sikap, serta membangun keterikatan terhadap isu tertentu (Caso & Hamilton, 2015).

Relasi antara budaya populer dan politik dunia juga tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang sederhana atau satu arah. Budaya populer dan politik dunia merupakan dua ranah yang saling berkaitan, kompleks, dan dinamis. Dengan demikian, penggunaan simbol dari budaya populer dalam aksi sosial-politik tidak hanya menunjukkan bahwa budaya populer memengaruhi politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana praktik politik masyarakat dapat membentuk ulang makna budaya populer sesuai dengan konteks sosial yang sedang berlangsung (Weldes & Rowley, 2015).

Keterlibatan budaya populer dalam arena politik bukanlah fenomena baru. Dalam dua dekade terakhir, budaya populer ini kerap berperan sebagai sarana simbolik bagi ekspresi sosial. Contohnya, film *V for Vendetta* yang melahirkan ikon topeng *Guy fawkes* dari kelompok demonstran Indignados di Spanyol (2011) hingga pada demonstran *Occupy* di seluruh Amerika Serikat dan Eropa (2011) dan para demonstrasi pro-demokrasi di Hongkong (2014 dan 2019) (Goodin, 2023). Hal serupa juga terlihat dalam penggunaan *three-finger salute* yang diadaptasi dari film *Hunger Games* sebagai bentuk protes terhadap kudeta yang terjadi di Thailand pada tahun 2014 dan 2020, serta di Myanmar pada tahun 2021, yang kemudian berkembang menjadi simbol solidaritas lintas negara (Antara & Irawanto, 2023). Contoh lainnya adalah penggunaan karakter kartun "*Pepe the Frog*" oleh demonstran

Hongkong pada 2019 yang digunakan dalam protes terhadap pemerintah dan polisi, serta keinginan untuk kebebasan dan demokrasi (Furqon, 2025).

Berbagai contoh tersebut menggambarkan bahwa simbol-simbol dari budaya populer semakin sering digunakan sebagai media ekspresi politik di berbagai konteks nasional. Penggunaan topeng *Guy Fawkes*, *three-finger salute*, hingga karakter *Pepe the Frog* mencerminkan pola yang serupa, yaitu bagaimana simbol fiksi dapat dimaknai ulang sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan. Pola ini menegaskan bahwa simbol budaya populer tidak lagi terbatas pada ranah hiburan, melainkan berkembang menjadi sarana ekspresi politik.

Dalam pola tersebut, fenomena serupa juga muncul di Indonesia meski dalam bentuk yang lebih cair dan kontekstual. Pada Juli hingga September 2025, masyarakat mengadaptasi simbol bendera bajak laut dari anime *One Piece* sebagai bentuk kritik terhadap ketidakadilan sosial dan politik di dalam negeri. Bendera dengan lambang tengkorak bertopi jerami tersebut mulai muncul di berbagai ruang publik mulai dari rumah, sepeda motor, hingga truk, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah (Fikri et al., 2025). Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga menjelaskan bahwa tekanan sosial-ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan pekerjaan, mendorong masyarakat mengekspresikan protes melalui satir dan simbolisme (Al Jazeera, 2025b).

Lebih lanjut, fenomena penggunaan simbol bendera *One Piece* ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga muncul di berbagai negara seperti di Nepal, Filipina, Prancis, dan Peru dengan konteks sosial-politik yang berbeda (Sawitri, 2025). Munculnya simbol yang sama dalam konteks nasional yang beragam

menunjukkan bahwa bendera One Piece tidak lagi bekerja sebagai simbol lokal, melainkan sebagai bahasa perlawanan yang dipahami secara lintas batas. Dominique Nicky Fahrizal, peneliti dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, menyebut bahwa karakter dan ikon bajak laut dalam serial tersebut berkembang menjadi media yang unik untuk meningkatkan kesadaran sosial dan politik (Kelly, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makna dari simbol tidak bersifat tetap atau terbentuk dengan sendirinya, melainkan terus dikonstruksikan melalui proses sosial yang melibatkan berbagai antaraktor dalam ruang yang bersifat lintas negara. Pembentukan makna tersebut berlangsung melalui interaksi di media sosial, pemberitaan internasional dan praktik simbolik di ruang publik, dimana berbagai aktor mulai dari penggemar, masyarakat umum hingga media turut berperan dalam membentuk dan menyebarkan makna simbol tersebut (Kadir, 2025). Proses inilah yang membuat bendera One Piece dapat berpindah dari makna fiksional menjadi simbol perlawanan politik yang dikenali secara global, meskipun digunakan dalam konteks lokal yang berbeda-beda.

Perkembangan makna simbolik semacam ini menimbulkan persoalan teoretis dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya mengenai bagaimana makna simbol dibentuk, dinegosiasikan, dan dipahami secara bersama, sehingga memungkinkan suatu simbol berfungsi sebagai bahasa perlawanan yang melampaui batas negara. Tanpa memahami proses pembentukan makna tersebut, fenomena pengibaran bendera One Piece berisiko dipahami hanya sebagai tren budaya

populer, bukan sebagai bagian dari dinamika politik global yang bekerja melalui simbol dan makna.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran simbol budaya populer dalam konteks politik, baik sebagai media komunikasi politik, sarana penyampaian pesan, maupun pembentuk identitas kolektif. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada konteks nasional khususnya Indonesia, sehingga belum banyak yang menempatkan simbol sebagai fenomena lintas negara dalam kajian Hubungan Internasional. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana makna simbol budaya populer dikonstruksikan dan menyebar secara transnasional, serta bagaimana simbol tersebut berfungsi sebagai bentuk perlawanan simbolik dalam dinamika politik global.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini lebih dalam melalui penelitian berjudul **“Analisis Konstruktivisme Terhadap Fenomena Pengibaran Bendera One Piece sebagai Bentuk Perlawanan Simbolik Global Tahun 2025”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses konstruksi makna yang membuat bendera One Piece dipahami sebagai simbol perlawanan dan berkembang menjadi bentuk perlawanan simbolik global pada tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses konstruksi sosial pengibaran bendera One Piece sebagai simbol perlawanan.
2. Menjelaskan bagaimana makna bendera One Piece menyebar melintasi batas-batas nasional dan dipraktikkan sebagai bentuk perlawanan simbolik global.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami perlawanan politik kontemporer yang bekerja melalui simbol dan makna. Melalui pendekatan konstruktivisme, penelitian ini melihat simbol budaya populer, seperti bendera One Piece sebagai hasil dari proses pembentukan makna sosial yang terus berkembang dan melibatkan interaksi lintas negara, sehingga memperkaya analisis mengenai perlawanan simbolik di luar bentuk-bentuk politik formal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana simbol budaya populer digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan kritik sosial dan politik secara kreatif. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat umum agar fenomena tersebut tidak dipahami hanya sebagai tren budaya populer, melainkan sebagai bagian dari dinamika ekspresi politik yang bekerja melalui simbol.